

**PERISTIWA PRRI/PERMESTA DALAM PANDANGAN INGATAN
ANTAGONISTIK DAN KOSMOPOLITAN DAN REPRESENTASI
IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT TIONGHOA ERA SOEHARTO**

Nurbaity
nurbaity_muthalib@yahoo.com
Universitas Indraprasta PGRI

Abstract

One of the events that happened in Indonesia and was considered a movement that rebelled against the central government during the Soekarno government was the PRRI/PERMESTA incident. The incident that occurred in 1958 was known to have been carried out by several military officials in the regions, especially the Sumatra and Sulawesi regions, which were also known to have been carried out by politicians from leading parties at that time in Indonesia. This event will be discussed in terms of the antagonistic and cosmopolitan collective memory that also dragged the United States' involvement at that time. In addition, there were also events that raised the Chinese community, which eventually they became part of Indonesian society, although in the process they were subjected to several policies that eliminated culture as their identity. This research is a library research study that uses historical methods, covering four stages, including: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The result of this research is that in the view of antagonistic and cosmopolitan memory, the PRRI/PERMESTA incident left a deep impression that the rebels against the central government received consequences and punishments that were not light. Conflicts between the center and the regions were resolved with a decision in favor of the center which was detrimental to the regions both in terms of the involvement of military personnel in the regions and the impact that politicians from well-known parties had to accept. In the next incident that happened to the Chinese community, they were exposed to policies that caused Chinese culture to disappear with the excuse that the Suharto regime government emphasized 'assimilation' in its journey as part of the process of representing the Chinese community in Indonesia.

Keywords: PRRI/PERMESTA, Antagonistic Memory, Cosmopolitan, Chinese

ABSTRAK

Salah satu peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai gerakan yang memberontak kepada pemerintahan pusat ketika pemerintahan Soekarno adalah peristiwa PRRI/PERMESTA. Peristiwa yang terjadi tahun 1958 itu diketahui dilakukan oleh beberapa petinggi militer yang ada di daerah khususnya wilayah Sumatera dan Sulawesi yang juga diketahui dilakukan oleh politikus dari partai terkemuka saat itu di Indonesia. Peristiwa ini akan dibahas dalam pandangan ingatan kolektif antagonistik dan kosmopolitan yang juga menyeret keterlibatan Amerika Serikat pada saat itu. Selain itu pula terdapat peristiwa yang mengangkat masyarakat Tionghoa yang akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat Indonesia walaupun

dalam prosesnya mereka dikenai beberapa kebijakan yang menghilangkan budaya sebagai identitas mereka. Penelitian ini merupakan studi library research yang menggunakan metode sejarah, meliputi empat tahap antara lain: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pandangan ingatan antagonistik dan kosmopolitan, peristiwa PRRI/PERMESTA meninggalkan kesan mendalam bahwa para pemberontak terhadap pemerintahan pusat mendapatkan akibat dan hukuman yang tidak ringan. Konflik antara pusat dan daerah yang terselesaikan dengan keputusan memihak ke pusat yang merugikan bagi daerah baik dari sisi keterlibatan personil militer di daerah maupun dampak yang harus diterima oleh politikus dari partai ternama. Dalam peristiwa berikutnya yang terjadi pada masyarakat Tionghoa terkena kebijakan yang menyebabkan budaya Tionghoa hilang dengan alasan pemerintah rezim Soeharto yang menekankan ‘asimilasi’ dalam perjalannya merupakan bagian dari proses representasi masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Kata Kunci: PRRI/PERMESTA, Ingatan Antagonistik, Kosmopolitan, Tiongho

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki sejarahnya masing-masing sebagai pembentuk kepribadian bangsanya. Tak terkecuali Indonesia memiliki perjalanan sejarahnya yang panjang, berliku, ada yang kelam dan ada yang membanggakan pula. Perjalanan panjang sejarah Indonesia itu perlu diceritakan kepada setiap generasi baik cerita sejarah yang baik maupun buruk sehingga mereka dapat menafsirkan narasi pemaknaan dari suatu peristiwa sejarah. Ada beberapa peristiwa sejarah yang mewarnai cerita bangsa Indonesia, diantaranya adalah peristiwa PRRI/Permesta yang terjadi pada tahun 1958 yang sebenarnya adalah gerakan protes daerah terhadap pemerintah pusat tetapi kemudian dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat di bawah Rezim Orde lama. Peristiwa sejarah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia / Pemerintahan Rakyat Semesta atau yang dikenal sebagai PRRI/PERMESTA salah satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang dianggap sebagai suatu peristiwa pemberontakan di Indonesia dan terus

terekam seperti itu dalam buku-buku sejarah Indonesia. PRRI/Permesta merupakan gerakan yang dianggap pemberontak sebagai kontra dari pemerintahan Soekarno yang digerakkan oleh para petinggi militer di beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi yang terjadi pada tahun 1958. Peristiwa itu akan dibahas lebih lanjut dalam bingkai konsep ingatan kolektif antagonistik dan Kosmopolitan.

Peristiwa selanjutnya yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang kelam adalah sejarah diaspora orang-orang Tionghoa yang mendapatkan tekanan atas kebijakan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sehingga menyebabkan identitas budaya mereka hilang. Dalam Hall dipaparkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang jelas dan tanpa masalah. Identitas sebagai sebuah "produksi" yang tidak pernah selesai, selalu dalam proses, dan selalu berada di dalam, bukan di luar, hal ini kemudian dikenal sebagai istilah representasi. Pandangan ini mempersoalkan otoritas dan keaslian di mana istilah "identitas kultural"

meletakkan klaimnya. Berikut ini akan dipaparkan sejarah diaspora masyarakat Tionghoa yang mendapat banyak kebijakan diskriminatif dengan alih-alih 'asimilasi' yang banyak merugikan masyarakat Tionghoa yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Peristiwa-peristiwa sejarah itu perlu untuk diceritakan pula kepada generasi penerus, sesuai dengan jargon yang pernah diungkapkan oleh Soekarno 'Jas Merah' : *Jangan sekali-kali Meninggalkan Sejarah* karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai sejarahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan tentang peristiwa PRRI/PERMESTA dan identitas Tionghoa pada rezim pemerintahan Soeharto . Tahap-tahap yang dilalui adalah tahap heuristik (pengumpulan data), tahap kritik, tahap interpretasi dan historiografi (penulisan sejarah). Tahap pertama yaitu heuristik, data-data dikumpulkan dari berbagai dokumen, surat kabar, majalah, buku, dan artikel . Pengumpulan data-data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan dipergunakan sumber-sumber primer berupa arsip dan suratkabar yang sezaman. Di samping sumber-sumber primer, digunakan pula sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan adalah buku dan majalah. Dari data-data yang terkumpul, kemudian dilakukan pengujian melalui kritik untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Dalam kajian ilmu sejarah, penelitian sejarah harus berangkat dari suatu peristiwa tertentu yang dapat menjadi momentum sehingga dapat ditelaah lebih jauh mengenai struktur dan agen yang membentuk peristiwa sejarah itu. PRRI/Permesta merupakan gerakan yang dianggap pemberontak sebagai kontra dari pemerintahan Soekarno yang digerakkan oleh para petinggi militer di beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi yang terjadi pada tahun 1958. Dalam pandangan Bull dan Hansen (2020) antagonistik dapat dicirikan dengan adanya subjek-subjek yang ditonjolkan antara pelaku dan korban serta adanya pemihakan. Dalam peristiwa ini ditonjolkan subjek pelaku adalah si pemberontak (beberapa petinggi militer di Sumatera dan Sulawesi dan beberapa tokoh politik Indonesia) sedangkan yang menjadi korban adalah pemerintah Soekarno dan masyarakat Indonesia. Kala itu, pemerintahan di bawah rezim Orde Lama (Soekarno) yang didukung kuat oleh PKI menganggap setiap gerakan yang dipimpin oleh militer yang notabene menjadi pesaing kuat PKI adalah musuh pemerintah. Di sini Bull dan Hansen (2020) juga ingin menyatakan bahwa antagonistic adalah suatu pemahaman untuk melihat bahwa konflik untuk mengeliminasi musuh guna mencapai masyarakat yang bebas konflik

Gerakan PRRI/PERMESTA ini terjadi karena semakin hebatnya keterlibatan PKI dalam pemerintahan Soekarno setelah kemenangan PKI dalam Pemilu tahun 1955 di urutan keempat diantara partai besar di Indonesia , ketimpangan antara daerah dan pusat (Jawa) karena pembangunan yang hanya berpusat di Jawa sedangkan

daerah (luar Jawa) adalah penyumbang komoditas sumber daya alam terbesar untuk Indonesia. Selain itu juga adanya konflik di dalam tubuh militer yang mana para petinggi militer di luar Jawa (Sumatera dan Sulawesi) melihat bahwa banyak ditempatkan orang-orang militer dari Jawa diberikan kesempatan untuk memimpin militer di wilayah luar Jawa. Sebab-sebab itulah yang akhirnya menggerakkan para tokoh militer daerah diantaranya adalah Kolonel Simbolon, Kolonel Sumual dari gerakan Permesta, dan Kolonel Lubis dan tokoh politik Indonesia dari partai Masyumi seperti Sjafruddin Prawiranegara, Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Djojohadikusumo melakukan suatu gerakan yang dianggap suatu pemberontakan oleh rezim pemerintahan Soekarno.

Selain tokoh-tokoh militer yang terlibat dalam PRRI/PERMESTA, terlibat pula salah partai besar kala itu yaitu Masyumi dan negara Amerika Serikat. Pihak Amerika memasok persenjataan kepada kaum pemberontak dan meminta kepada Jakarta untuk mendaratkan suatu pasukan marinir Amerika dengan dalih melindungi warga negara dan milik Amerika di ladang-ladang minyak Sumatera. Pada tanggal 15 Februari 1958 diumumkan suatu pemerintahan pemberontak di Sumatera, dengan markas besarnya di Bukit Tinggi. Pemerintahan ini terkenal dengan nama PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Sjafruddin menjadi perdana menternya (1958-1961); anggota kabinetnya termasuk Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo, dan Simbolon. Pada tanggal 16

Februari 1958, Soekarno kembali dari luar negeri dan mendesak diterapkannya perlakuan yang keras terhadap kaum pemberontak serta kebanyakan pemimpin PNI, PKI, juga menghendaki agar pemberontakan itu ditumpas.

Dalam Ricklefs (2008: 520) dipaparkan bahwa pihak militer bertindak secara cepat dalam menumpas gerakan tersebut. Angkatan Udara mengebom instalasi-instalasi PRRI di Padang, Bukittinggi, dan Manado pada akhir Februari 1958. Pada awal Maret tahun 1958, pihak tentara mulai mendaratkan satuan-satuan dari Divisi Siliwangi dan divisi Diponegoro yang berpangkalan di Jawa di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani di Sumatera. Dampak dari peristiwa itu diantaranya banyak perwira militer yang membangkang dikeluarkan dari urusan-urusan militer sehingga Nasution menjadi pimpinan militer yang tak tertandingi. Pada bulan Juli 1958, pangkat Nasution dinaikkan menjadi Letnan Jenderal, sehingga dialah orang pertama yang mendapat pangkat itu setelah Soedirman. Dalam Ricklefs (2008: 521) disebutkan bahwa kebanyakan perwira yang diberhentikan itu berasal dari daerah-daerah luar Jawa, sehingga korps perwira semakin banyak ditempati oleh orang-orang Jawa; pada tahun 1960-an, diperkirakan 60 sampai 80% perwira Militer adalah orang Jawa, padahal jumlah kelompok suku itu hanya sekitar 45% dari jumlah total penduduk Indonesia.

Meletusnya pemberontakan PRRI secara cepat menimbulkan dampak yang besar terhadap hubungan

luar negeri Indonesia. Ribuan nyawa telah menjadi korban, dan tak seorang pun dapat melupakan kejadian itu dengan mudah. Simpati dan dukungan Amerika kepada PRRI sangat jelas bagi Jakarta dan benar-benar merusak hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Bull dan Hansen (2020) menyatakan bahwa memori antagonistik dapat mengabadikan permusuhan lintas generasi. Pandangan tersebut dapat terlihat juga dalam peristiwa PRRI/Permesta ini yang selalu dinarasikan dalam buku teks sejarah Indonesia menekankan bahwa tokoh-tokoh pelaku adalah sebagai pemberontak yang kemudia buku-buku itu menjadi konsumsi para pelajar di sekolah dari generasi ke generasi. Hal itu pada akhirnya berdampak salah satunya ketika keluarga dan beberapa sejarawan mengusulkan agar Sjafrudin Prawiranegara yang dianggap terlibat dalam gerakan itu diakui juga sebagai salah satu Presiden Republik Indonesia karena atas perintah Soekarno (pada saat itu ditangkap Sekutu) pernah menggantikan Soekarno sementara melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi ternyata ditolak hingga saat ini. “Dosa sejarah” adalah sebab yang membuat Sjafrudin Prawiranegara tidak diakui sebagai salah satu presiden Republik Indonesia.

Sedangkan dalam pandangan Levy dan Sznaider (2002) menekankan pada konsep kosmopolitanisme sebagai ‘globalisasi internal’, sebuah masalah lokal menjadi bagian dari kekhawatiran global yang menghasilkan representasi media global. Elemen yang khas dari media baru (*New Media*) adalah munculnya ‘peristiwa media’ yang mengangkat kehidupan lokal menjadi

konsumsi dunia sehingga terbangun perasaan kuat bersama. Levy dan Sznaider (2002) menyatakan Kosmopolitan juga berarti bahwa pemahaman dunia sebagai entitas penuh harmoni. Pandangan ini dalam peristiwa PRRI/Permesta adalah keterkaitan Negara internasional seperti Amerika Serikat yang kala itu sedang menerapkan politik pembendungan komunis memberikan andil dalam peristiwa itu. Pihak Amerika memasok persenjataan kepada kaum pemberontak dan meminta kepada Jakarta untuk mendaratkan suatu pasukan marinir Amerika dengan dalih melindungi warga negara dan milik Amerika di ladang-ladang minyak Sumatera (Ricklefs, 2008: 519). Keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa itu, kini menjadi kekuatan untuk membangun dunia baru yang lebih aman dan kuat dan menjadikan pengalaman yang dahulu sebagai memori untuk disimpan demi kemanusiaan.

Berikunya akan dipaparkan sejarah diaspora masyarakat Tionghoa yang mendapat banyak kebijakan diskriminatif di era Soeharto dengan alih-alih ‘asimilasi’ yang banyak merugikan masyarakat Tionghoa yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Dalam catatan Blackburn (2011: 255), pada tahun 1961, terdata sekiranya 294.000 jiwa masyarakat Tionghoa yang bermukim di Jakarta. Pada masa pergantian pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru banyak menuai perundang-undangan baru dalam setiap aspeknya, salah satunya adalah perundang-undangan asimilasi bagi keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Sebagai tindak lanjutan dari

kebijakan yang sebelumnya pernah dikeluarkan, kebijakan ini lebih banyak menyimpan kesan ambigu antara ingin meredakan pandangan negatif rakyatnya terhadap etnis ini atau malah menambah kesan pendiskriminasian akan keberadaan mereka. Alih-alih sebagai kebijakan asimilasi tetapi kebijakan ini justru menghilangkan identitas asli masyarakat Tionghoa. Kebijakan yang dikatakan untuk tujuan ‘asimilasi’ itu diantaranya, pada tahun 1966, pemerintah menetapkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966, yang berisi tentang penggantian nama orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia dengan nama lokal sebagai bentuk asimilasi. Dalam Assidiqi (2018: 384-385) disebutkan bahwa pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru juga melarang pelaksanaan aktivitas peribadatan, kegiatan festival kebudayaan, hingga bahasa yang biasa mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari.

Begitu kuatnya relasi kekuasaan dalam menekan identitas suatu bangsa terlihat dari kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru seperti dituliskan berikut ini. Terkait status kewarganegaraan mereka, Gouw Giok Siong dalam Astiagyna (2012: 73) menjelaskan tentang ketetapan pemerintahan Indonesia atas kebijakan Dwi Kewarganegaraan bahwa setiap masyarakat keturunan Tionghoa harus menolak kewarganegaraan Tionghoa secara jelas dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Melewati batas waktu yang ditentukan sama saja dengan menolak menjadi bagian dari kewarganegaraan Indonesia.

Pecahnya peristiwa 30 September 1965 membuat masyarakat Tionghoa mengalami perlakuan yang

kurang menyenangkan dari sebagian besar warga negara Indonesia. Dalam upaya meredakan situasi warganya yang tengah memanas, pemerintah Orde Baru beberapa kali mengeluarkan kebijakan terkait kependudukan Tionghoa. Pemerintah juga berharap dengan penerapan kebijakan ini dapat mempercepat proses asimilasi masyarakat Tionghoa sehingga dapat memperlancar pembauran setiap masyarakatnya.

Untuk menghindari adanya gerakan pemberontakan seperti yang terjadi pada tahun 1965, pemerintah memberlakukan TAP MPRS No. 32/1966 terkait ‘Pembinaan Pers’ penduduk Tionghoa di Indonesia guna memutus mata rantai pemahaman dan ajaran komunis pada pihak masyarakat, khususnya Tionghoa. Tepat pada 8 September 1966, sekitar 10 surat kabar harian berbahasa Tionghoa di tutup. Dalam Kompas (1966: 2), berdasarkan keterangan Rze Pao meninjau kondisi Indonesia saat ini, pemerintah hanya akan menerbitkan satu surat kabar berbahasa (aksara) Tionghoa dengan nama ‘Harian Indonesia’. Dalam Chessigi (2018: 120) dipaparkan bahwa setelah dikeluarkannya kebijakan ini, segala cetakan baik surat kabar, buku-buku pendidikan dan media pers lainnya yang masih menggunakan bahasa maupun aksara Tionghoa mulai dihapuskan dan membuat kemampuan membaca, menulis dan berbahasa Tionghoa generasi muda Tionghoa menghilang. Pada tahun selanjutnya pemerintah juga memberlakukan sejumlah kebijakan terkait identitas dan penyelesaian proses asimilasi mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Pada tahun 1967, seluruh masyarakat Tionghoa di Indonesia mengalami krisis identitas yang disebabkan dengan pemberlakuan kebijakan terkait penggantian nama serta pelarangan aktivitas keagamaan, peribadatan, ataupun hari besar Tionghoa yang berbau kultur budaya negara Tionghoa dihadapan publik. Mereka memang masih bisa melaksanakannya di rumah bersama sanak saudara mereka, tapi hal ini tidak sama dengan suasana yang mereka rasakan sebelum kebijakan ini diberlakukan. Terkait kebijakan penggantian nama, tidak sedikit masyarakat Tionghoa yang merasa pusing dengan kebijakan ini. Berdasarkan situasi yang ada, Yap Thiam Hien S.H. dalam harian Kompas yang diterbitkan pada 26 Januari 1967 menyatakan pendapatnya dan mengimbau kepada masyarakat Tionghoa untuk tidak perlu mengganti nama bila tidak ingin. Dirinya juga menjelaskan hal yang perlu dipersiapkan masyarakat Tionghoa untuk mengurus penggantian nama tersebut. Harian Kompas (1967: 1) menyebutkan bahwa kebijakan ini juga menggerakkan aktivis mahasiswa Katolik di Jakarta untuk mengulurkan bantuan dan arahan kepada masyarakat Tionghoa yang ingin mengganti namanya melalui beberapa tempat di kota Jakarta yang mulai diadakan mulai tanggal 6 Maret 1967.

Di tahun 1978, masyarakat Tionghoa kembali dihadapkan oleh kebijakan lainnya yang baru ditetapkan pemerintah sebagai penegasan langkah dari kebijakan sebelumnya terkait pembinaan pers. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan dari Menteri Perdagangan dan Koperasi No.

286/Kp/XII/78, Indonesia melarang segala kegiatan seperti mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara dan bahasa Tionghoa. Dalam Dawis (2010: 110) disebutkan bahwa kebijakan ini dianggap perlu sebagai bagian dari langkah meningkatkan pembangunan bahasa nasional yang merupakan salah satu cara menanam dan mengembangkan kebudayaan yang menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam teori kebudayaan salah satunya dibahas mengenai pandangan ingatan kolektif antagonistic dan cosmopolitan, dalam refleksinya pada peristiwa sejarah di Indonesia dapat dilihat dari peristiwa PRRI/PERMESTA. Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana subjek-subjek yang terlihat sebagai pelaku dan korban yang begitu menonjol. Dalam ingatan kolektif antagonistic, peristiwa PRRI/PERMESTA merupakan konflik local yang terjadi di Indonesia yang pernah juga menyeret peran Amerika Serikat dalam kepentingannya membendung paham komunis dan menjaga segala milik Amerika di Indonesia terjaga dengan aman. Amerika kemudian memberikan bantuan kepada pihak yang disebut sebagai pelaku dalam peristiwa itu. Dalam situasi modern sekarang ini, ketika dunia baru telah aman, keterlibatan Amerika dianggap tidak dipermasalahkan lagi untuk mencapai masyarakat yang bebas konflik sesuai dengan pemahaman cosmopolitan yang menganggap bahwa segala masyarakat dunia berjalan harmoni. Begitupun dengan peristiwa yang pernah terjadi

ketika identitas masyarakat Tionghoa yang sengaja dihilangkan alih-alih alasan asimilasi. Representasi masyarakat Tionghoa di Indonesia terwujud sejak lama yang berproses hingga akhirnya mereka menjadi bagian dari warga bangsa Indonesia. Proses yang panjang dan kelam pernah dirasakan oleh masyarakat Tionghoa yang terkena kebijakan yang menyebabkan banyaknya kebiasaan atau adat-istiadat, kewarganegaraan, terbitan khusus untuk masyarakat Tionghoa sengaja dihilangkan untuk mencapai suatu asimilasi di Indonesia di bawah rezim Soeharto.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, Hamas. (2018). Kebijakan Asimilasi Terhadap Etnis Tionghoa Di Jakarta Tahun 1966-1998. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*. Vol. 3, No. 3. 375-388, dapat diakses melalui <http://journal.student.uny.ac.id>
- Astiagyna, Shintia. (2012). “*Perjanjian Dwikenegaraan : Kehidupan Etnis Tionghoa Di Glodok (1955-1969)*”. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Blackburn, Susan. (2011). “*Jakarta: A History*”. (trj) Triwira, Gatot. Jakarta: Masup.
- Cento Bull, A and Hansen, HL. (2020). Agonistic Memory and the UNREST Project. *Modern Languages Open*, 1(20).
- Chessiagi, Levia dkk. (2018). Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa Dalam Bingkai Kebijakan Asimilasi Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. 7(1), dapat diakses melalui <https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/download/11941/7196>
- Dawis, Aimee. (2010). “*Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hall, Stuart. (2020). *Cultural Identity and Diaspora*. Routledge
- Levy, Daniel and Sznajder, Natan. (2002). Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory. *European Journal of Social Theory*. 5.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi.
- Yap Thiam Hien S.H.. (1967). “*Hal-Hal Apa Harus Diperhitungkan Kalau Ingin Ganti Nama*”. Kompas: 26 Januari 1967.